

Nama : Ni Wayan Vara Wulandari

NPM : 2313031017

Mata Kuliah : Ekonomi Pendidikan

Kelas : A

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

1. Efisiensi Anggaran Pendidikan

Pemerintah Kabupaten A mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 30% dari APBD. Sebagian besar dana digunakan untuk pembangunan gedung sekolah baru, sedangkan pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan pengadaan media pembelajaran digital masih sangat terbatas. Setelah lima tahun, angka partisipasi sekolah meningkat, tetapi kualitas hasil belajar siswa tidak mengalami peningkatan signifikan.

Pertanyaan

1. Analisis penggunaan anggaran pendidikan pada kasus tersebut berdasarkan konsep efisiensi internal dan eksternal pendidikan.

Jawaban:

- a. Efisiensi Internal Penggunaan anggaran di Kabupaten A tidak efisien secara internal. Efisiensi internal berarti bagaimana anggaran diolah di dalam sekolah untuk menghasilkan prestasi belajar yang sebanding dengan biaya yang keluar. Pada kasus ini, anggaran besar habis untuk membangun gedung baru, sedangkan pelatihan guru dan media digital sangat minim. Akibatnya, meskipun fasilitas fisik bertambah, kualitas hasil belajar siswa tetap tidak meningkat. Ada ketidakseimbangan alokasi dana antara pembangunan fisik dan peningkatan mutu pembelajaran.
- b. Efisiensi Eksternal
Kebijakan ini juga tidak efisien secara eksternal. Efisiensi eksternal mengukur apakah lulusan yang dihasilkan sekolah memiliki kompetensi yang bermanfaat untuk dunia luar atau pasar kerja. Karena hasil belajar siswa stagnan selama lima

tahun, lulusan dari Kabupaten A kemungkinan besar tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk bersaing. Anggaran yang besar gagal memberikan dampak nyata bagi peningkatan produktivitas masyarakat di luar sekolah.

2. Jelaskan dampak kebijakan tersebut terhadap kualitas sumber daya manusia.

Jawaban:

Dampak Kebijakan terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Jika kebijakan anggaran ini terus dipertahankan, dampak buruk terhadap kualitas SDM di Kabupaten A antara lain:

- Penurunan mutu lulusan, daerah ini akan menghadapi fenomena di mana jumlah lulusan secara kuantitas meningkat tajam, namun secara kualitas kompetensinya rendah. Lulusan memiliki ijazah formal tetapi tidak memiliki keahlian nyata.
- Kesenjangan keterampilan (*Skill Gap*), minimnya media pembelajaran digital dan pelatihan guru membuat siswa di daerah ini gagap teknologi. Mereka akan tertinggal jauh dari lulusan daerah lain yang sistem pendidikannya sudah berbasis digital.
- Rendahnya daya saing daerah, angkatan kerja baru di Kabupaten A tidak akan mampu mengisi posisi pekerjaan yang membutuhkan keahlian tinggi. Akibatnya, daerah tersebut sulit menarik investasi dan pertumbuhan ekonomi regional akan terhambat karena kualitas manusianya tidak mendukung inovasi.

Berikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

Jawaban:

Untuk memperbaiki ketimpangan ini, Pemerintah Kabupaten A harus segera merombak strategi pengelolaan anggaran pendidikan dengan mengalihkan fokus dari pembangunan fisik ke peningkatan mutu pembelajaran. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengurangi atau menghentikan sementara proyek pembangunan gedung sekolah baru jika kapasitas tampung yang ada saat ini sudah mencukupi kebutuhan wilayah tersebut. Anggaran yang tadinya dialokasikan untuk sektor fisik harus dialihkan secara proporsional untuk membiayai program-program peningkatan kualitas instruksional di dalam kelas, seperti pelatihan pedagogi berkala untuk para guru, pembaruan kurikulum yang adaptif, serta pengadaan perangkat teknologi dan media pembelajaran digital. Selanjutnya, pemerintah daerah perlu mengubah sistem pertanggungjawaban anggaran menjadi sistem berbasis kinerja. Melalui pendekatan ini, indikator keberhasilan dari penyerapan dana

pendidikan sebesar 30% APBD tidak boleh lagi diukur secara kuantitas berdasarkan banyaknya bangunan fisik yang berdiri, melainkan harus diukur secara kualitas. Tolok ukur utamanya harus diganti menggunakan pencapaian akademik dan non-akademik siswa, seperti kenaikan nilai rata-rata ujian, peningkatan skor literasi dan numerasi daerah, serta meningkatnya persentase guru yang tersertifikasi secara profesional.

Terakhir, pengadaan media pembelajaran digital yang selama ini terbatas harus dibarengi dengan pendampingan teknologi yang intensif bagi tenaga pendidik. Pemerintah tidak boleh hanya sekadar membagikan perangkat komputer atau proyektor ke sekolah-sekolah, melainkan harus memastikan bahwa para guru memiliki kemampuan yang matang untuk mengintegrasikan teknologi tersebut ke dalam metode mengajar sehari-hari. Dengan mengarahkan anggaran langsung pada inti proses belajar-mengajar, dana APBD yang besar akan jauh lebih efektif dalam mendongkrak kompetensi nyata siswa dan menghasilkan lulusan yang siap bersaing di era modern.

2. Ketimpangan Akses Pendidikan

Sekolah di wilayah perkotaan memiliki laboratorium lengkap, akses internet cepat, dan guru profesional. Sebaliknya, sekolah di daerah pedesaan mengalami kekurangan guru, fasilitas minim, dan keterbatasan teknologi. Akibatnya, hasil ujian siswa di desa jauh lebih rendah dibandingkan siswa di kota.

Pertanyaan

1. Jelaskan bentuk ketimpangan pendidikan pada kasus tersebut.

Jawaban:

Bentuk ketimpangan pendidikan yang terjadi pada kasus tersebut adalah Ketimpangan Struktural Berbasis Spasial (Kota-Desa). Ketimpangan ini terlihat sangat jelas dari adanya kesenjangan yang lebar pada penyediaan input pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Sekolah di kota mendapatkan fasilitas yang serba lengkap, seperti laboratorium, internet cepat, dan pasokan guru-guru profesional. Sebaliknya, sekolah di desa justru mengalami kondisi yang memprihatinkan akibat kekurangan guru, fasilitas belajar yang minim, serta keterbatasan akses teknologi. Ketimpangan pada fasilitas dan tenaga pendidik ini otomatis merusak keadilan proses belajar-mengajar. Akibatnya, terjadi ketimpangan hasil (*output*) yang nyata, di mana nilai atau hasil ujian siswa yang bersekolah di desa menjadi jauh lebih rendah dan tertinggal dibandingkan dengan siswa yang bersekolah di kota.

2. Analisis dampak ekonomi jangka panjang dari ketimpangan pendidikan.

Jawaban:

Dalam jangka panjang, ketimpangan pendidikan ini akan menciptakan fenomena Perangkap Kemiskinan Antargenerasi (*Poverty Trap*) di wilayah pedesaan. Karena anak-anak di desa menerima kualitas pendidikan yang rendah, ketika lulus mereka tidak akan memiliki daya saing dan keterampilan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan yang layak atau berupah tinggi. Kondisi ini membuat mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sama dengan generasi orang tua mereka.

Selain itu, dampak makro ekonominya adalah melebarnya jurang kesenjangan pendapatan daerah. Wilayah perkotaan akan melaju lebih cepat secara ekonomi karena didukung oleh sumber daya manusia yang unggul, berkeahlian tinggi, dan melek teknologi. Sementara itu, wilayah pedesaan akan semakin tertinggal karena angkatan kerjanya tidak produktif, yang pada akhirnya dapat memicu angka urbanisasi massal yang tidak terkendali dan menghambat pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan.

Usulkan solusi kebijakan untuk mengurangi ketimpangan tersebut.

Jawaban:

Untuk mengatasi ketimpangan ini, pemerintah harus segera mengintervensi melalui kebijakan afirmatif yang berfokus pada pemerataan mutu. Langkah pertama adalah menerapkan kebijakan distribusi guru yang adil, misalnya dengan memberikan insentif finansial yang tinggi, tunjangan khusus, dan jaminan fasilitas rumah dinas bagi guru-guru profesional yang bersedia ditempatkan di sekolah pedesaan. Langkah ini penting untuk mengatasi masalah kekurangan guru di desa dan memastikan kualitas pengajaran menjadi setara dengan di kota.

Langkah kedua adalah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital dan pemenuhan fasilitas dasar di pedesaan. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk program internet masuk sekolah desa dan pengadaan laboratorium komputer terpadu. Terakhir, formulasi bantuan dana operasional sekolah harus diubah menjadi sistem asimetris, di mana sekolah-sekolah di desa atau daerah terpencil menerima alokasi anggaran per siswa yang lebih besar daripada sekolah di kota. Dana lebih ini bisa digunakan oleh pihak sekolah di desa untuk mengejar ketertinggalan fasilitas operasional mereka secara mandiri.

3. Pengangguran Terdidik

Jumlah lulusan perguruan tinggi di Kota B meningkat setiap tahun. Namun, banyak lulusan menganggur atau bekerja tidak sesuai bidang studinya. Dunia industri menilai kompetensi lulusan belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pertanyaan

1. Analisis penyebab pengangguran terdidik berdasarkan teori human capital.

Jawaban:

Menurut Teori *Human Capital* (Modal Manusia), pendidikan dipandang sebagai bentuk investasi strategis jangka panjang yang dilakukan individu untuk meningkatkan produktivitas, pengetahuan, serta kapasitas ekonomi dirinya. Dalam logika ekonomi pasar tenaga kerja, semakin tinggi jenjang pendidikan formal yang diselesaikan seseorang, maka semakin tinggi pula akumulasi modal manusia yang ia miliki. Logikanya, pasar kerja akan secara otomatis menghargai tingkat produktivitas yang tinggi tersebut dalam bentuk upah yang kompetitif atau pemberian posisi pekerjaan yang layak dan mapan. Namun, fenomena lonjakan angka pengangguran terdidik di Kota B menunjukkan adanya kegagalan fungsi dalam investasi modal manusia tersebut, atau yang biasa disebut dengan istilah *investment mismatch*. Banyaknya lulusan perguruan tinggi yang menganggur atau terpaksa bekerja di luar bidang studinya terjadi karena gelar akademik yang meningkat secara kuantitas setiap tahun tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas kompetensi yang nyata di dalam diri lulusan.

Pihak dunia usaha dan dunia industri (DUDI) menilai bahwa pengetahuan teoretis, keterampilan teknis (*hard skills*), serta karakter kerja (*soft skills*) yang dibawa oleh para sarjana dari bangku kuliah belum mampu memenuhi standar produktivitas minimum yang dibutuhkan dalam ekosistem kerja modern. Dari sudut pandang teori ini, pengangguran terdidik timbul bukan karena ketiadaan modal manusia, melainkan karena perguruan tinggi memproduksi jenis modal manusia yang keliru dan tidak sesuai dengan kualifikasi kualitas yang diinginkan industri, sehingga pasar kerja memilih untuk menolak pasokan tenaga kerja tersebut demi efisiensi perusahaan.

2. Jelaskan hubungan antara pendidikan dan pasar kerja pada kasus tersebut.

Jawaban:

Hubungan antara institusi pendidikan tinggi dan pasar kerja di Kota B saat ini berada dalam kondisi yang tidak harmonis dan mengalami gejala ketidaksesuaian struktural (*structural mismatch*). Perguruan tinggi di sini bertindak sebagai lembaga hulu yang menyuplai tenaga kerja (*supplier*), sementara dunia industri bertindak sebagai lembaga hilir yang menyerap atau menggunakan tenaga kerja tersebut (*demand*). Masalah utamanya terletak pada ego sektoral lembaga pendidikan, di mana universitas berjalan secara mandiri dan cenderung menutup mata terhadap tren global, disrupsi teknologi, serta kualifikasi kompetensi riil yang sedang bergerak dinamis di lapangan usaha. Akibatnya, perguruan tinggi terus-menerus meluluskan mahasiswa dalam jumlah besar hanya berdasarkan kapasitas internal dan rutinitas kurikulum lama mereka sendiri (berorientasi pada pasokan/ *supply-driven*). Lembaga pendidikan gagal melihat apa yang sebenarnya sedang dicari dan dibutuhkan oleh lapangan kerja hari ini (berorientasi pada permintaan/ *demand-driven*). Ketidaksinambungan antara apa yang diajarkan di kelas dengan apa yang dikerjakan di pabrik atau kantor inilah yang menjadi akar penyebab mengapa ijazah sarjana kehilangan tarungnya di pasar tenaga kerja.

Berikan rekomendasi untuk meningkatkan relevansi lulusan.

Jawaban:

Untuk memutus rantai pengangguran terdidik ini dan mendongkrak kembali relevansi lulusan, perguruan tinggi di Kota B harus segera merevolusi model pendidikannya dengan menerapkan konsep *link and match* secara total bersama dunia industri. Perguruan tinggi tidak boleh lagi menyusun kurikulum secara sepihak; mereka wajib duduk bersama dengan asosiasi perusahaan, praktisi profesional, dan perwakilan industri untuk merancang ulang mata kuliah secara berkala agar selalu sejalan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, program magang kerja yang komprehensif dan mendalam harus dijadikan sebagai mata kuliah wajib yang terstruktur, setidaknya selama satu hingga dua semester penuh. Lewat program magang yang matang ini, mahasiswa tidak hanya sekadar datang menonton, melainkan terlibat langsung untuk menyerap budaya kerja, mengasah *problem-solving*, dan menguasai teknologi industri terkini, sehingga ketika lulus mereka sudah memiliki pengalaman kerja yang matang.

Di sisi lain, intervensi dari Pemerintah Kota B juga sangat krusial untuk bertindak sebagai jembatan informasi. Pemerintah daerah harus memfasilitasi pembentukan Sistem Informasi Pasar Kerja (*Labor Market Information System*) yang mutakhir dan terintegrasi.

Sistem ini bertugas untuk memetakan dan menyediakan data proyeksi berkala mengenai sektor ekonomi apa saja yang akan tumbuh, jenis pekerjaan baru apa yang akan muncul, serta keahlian spesifik apa yang paling dicari dalam tiga hingga lima tahun ke depan. Dengan berpatokan pada data riil tersebut, perguruan tinggi dapat mengambil keputusan strategis untuk menyesuaikan kuota penerimaan mahasiswa baru, merevitalisasi jurusan yang sudah jenuh, atau membuka program studi baru yang masa depannya lebih menjanjikan, sehingga seluruh lulusan dapat terserap secara optimal oleh pasar kerja.

4. Kenaikan Biaya Pendidikan

Sebuah universitas swasta menaikkan uang kuliah sebesar 25% untuk meningkatkan fasilitas kampus dan layanan akademik. Kebijakan tersebut mendapat protes dari mahasiswa karena dinilai memberatkan keluarga berpenghasilan rendah.

Pertanyaan

1. Analisis kasus tersebut berdasarkan konsep pendidikan sebagai barang publik dan barang privat.

Jawaban:

Pendidikan tinggi pada dasarnya memiliki dua sisi nilai, yaitu sebagai barang publik sekaligus barang privat. Sebagai barang publik, pendidikan menghasilkan eksternalitas positif yang sangat besar bagi kemaslahatan masyarakat luas, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menekan angka kriminalitas, dan menciptakan masyarakat yang cerdas. Karena adanya nilai sosial ini, mahasiswa menganggap universitas harus tetap memiliki karakteristik barang publik yang harganya terjangkau demi keadilan sosial. Namun, sebagai barang privat, pendidikan memberikan manfaat eksklusif yang dinikmati secara langsung oleh individu yang menjalaninya, berupa peluang mendapatkan status sosial, karier yang bagus, dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi di masa depan. Universitas swasta pada kasus ini bergerak dengan logika barang privat, di mana peningkatan mutu fasilitas kampus dan layanan akademik membutuhkan biaya operasional yang besar. Pihak universitas membebankan biaya peningkatan kualitas tersebut langsung kepada konsumennya, yaitu mahasiswa.

2. Jelaskan dampak sosial ekonomi dari kenaikan biaya pendidikan.

Jawaban:

Secara sosial, kenaikan biaya kuliah sebesar 25% ini akan memicu terjadinya eksklusivitas sosial atau pembatasan akses. Perguruan tinggi akan berubah menjadi lembaga eksklusif yang hanya bisa dinikmati oleh kelompok masyarakat ekonomi menengah ke atas, sehingga memutus jalur mobilitas vertikal bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperbaiki taraf hidup mereka. Secara ekonomi, kebijakan ini jelas menurunkan angka partisipasi kuliah dari kelompok rentan akibat kendala finansial. Bagi keluarga berpenghasilan rendah yang memaksakan diri agar anaknya tetap kuliah, kenaikan biaya yang drastis ini akan mengorbankan pos pengeluaran penting lainnya, seperti pemenuhan gizi, pangan, dan kesehatan keluarga. Dalam jangka panjang, daerah tersebut akan kekurangan pasokan tenaga kerja ahli karena banyak calon mahasiswa potensial yang gagal melanjutkan pendidikan.

3. Apakah pemerintah perlu melakukan intervensi? Jelaskan alasannya.

Jawaban:

Pemerintah sangat perlu melakukan intervensi dalam kasus ini demi mengatasi kegagalan pasar (*market failure*). Jika tata kelola biaya pendidikan tinggi dilepaskan sepenuhnya pada mekanisme pasar bebas swasta, hak masyarakat miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak akan hilang. Intervensi pemerintah tidak harus berupa larangan bagi kampus untuk berkembang, melainkan melalui kebijakan regulasi yang adil. Pemerintah dapat mewajibkan universitas swasta tersebut untuk menyediakan kuota beasiswa atau skema pemotongan biaya kuliah minimal 20% bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Selain itu, pemerintah bisa menghadirkan program bantuan dana pendidikan bersubsidi atau skema pinjaman pendidikan jangka panjang tanpa bunga (*student loan*) yang dikelola negara, sehingga mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah tetap memiliki kesempatan yang sama untuk menuntaskan studi mereka.

5. Digitalisasi Pembelajaran

Pasca pandemi, sekolah menerapkan pembelajaran berbasis digital. Namun, siswa dari keluarga kurang mampu mengalami kesulitan membeli perangkat dan kuota internet sehingga partisipasi belajar menurun.

Pertanyaan

1. Analisis masalah tersebut menggunakan konsep biaya pendidikan dan opportunity cost.

Jawaban:

Digitalisasi pembelajaran pasca-pandemi secara drastis telah mengubah struktur biaya pendidikan (*cost of education*) yang harus ditanggung oleh keluarga. Biaya privat yang dulunya dialokasikan untuk keperluan fisik, seperti ongkos transportasi atau buku cetak, kini bergeser menjadi biaya investasi perangkat keras (gawai atau laptop) dan biaya operasional rutin berupa kuota internet. Bagi keluarga kurang mampu, pengeluaran baru ini menjadi beban finansial yang sangat berat. Di sisi lain, penurunan partisipasi belajar akibat kendala biaya ini menciptakan *opportunity cost* (biaya peluang) jangka panjang yang sangat besar. Ketika seorang anak dari keluarga miskin tidak bisa mengikuti pembelajaran digital, biaya peluang yang hilang adalah waktu emas untuk mengakumulasi modal manusia (*human capital*). Masa depan anak tersebut untuk memperoleh keahlian terbuang sia-sia, dan bagi orang tua yang terdesak ekonomi, mereka mungkin dihadapkan pada pilihan sulit: terpaksa menyuruh anak bekerja demi membantu dapur rumah tangga dan mengorbankan masa depan pendidikannya.

2. Jelaskan dampak kesenjangan digital terhadap kualitas pendidikan.

Jawaban:

Kesenjangan digital ini berdampak langsung pada penurunan kualitas pendidikan secara timpang, yang memicu terjadinya fenomena kehilangan kemampuan belajar (*learning loss*). Siswa dari keluarga kaya dapat memanfaatkan fasilitas digital yang memadai untuk terus berkembang, sedangkan siswa dari keluarga kurang mampu akan semakin tertinggal secara kognitif dan akademik. Akibatnya, kesenjangan kualitas output pendidikan antarkelas sosial akan semakin melebar dan memperparah ketimpangan kompetensi generasi muda di masa depan.

Berikan solusi kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut.

Jawaban:

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus segera mengintervensi dengan tiga solusi kebijakan yang nyata:

- a. Subsidi perangkat dan kuota tepat sasaran yaitu meluncurkan kembali program bantuan kuota internet gratis dan subsidi pengadaan gawai belajar yang disalurkan khusus kepada siswa dari keluarga prasejahtera yang tercatat dalam data kemiskinan daerah.
- b. Penyediaan fasilitas digital publik yaitu membangun "Pojok Digital" atau ruang multimedia gratis di setiap balai desa atau sekolah terdekat yang dilengkapi dengan jaringan Wi-Fi dan komputer, sehingga siswa yang tidak memiliki perangkat di rumah tetap bisa mengakses pembelajaran dengan baik.
- c. Fleksibilitas metode belajar (*Blended Learning*) yaitu memberikan ruang bagi sekolah untuk menerapkan kombinasi pembelajaran luring (tatap muka terbatas) atau sistem jemput modul cetak berkala khusus bagi siswa-siswa yang benar-benar mengalami keterbatasan teknologi, agar hak belajar mereka tidak hilang.